

KAPABILITAS PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MITIGASI BENCANA MELALUI SEKOLAH CERDAS BENCANA

Kriswanto Sijabat¹, Roni Ekha Putera², Wewen Kusumi Rahayu³

Jurusan Administrasi Publik FISIP Unand, Padang¹²³

kriswantosijabat@gmail.com¹, roniekhaputera@soc.unand.ac.id², wewenkr@gmail.com³

Abstrak

Kota Padang berada di daerah yang rawan bencana, untuk itu dibutuhkan sebuah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana atau biasa disebut dengan mitigasi bencana. Peningkatan kesadaran masyarakat menghadapi bencana ini dimulai pada anak usia dini dan dilakukan di ranah pendidikan. Upaya itu diwujudkan dengan sebuah kegiatan bernama Sekolah Cerdas Bencana. Kegiatan ini dilakukan ke sekolah-sekolah yang berada pada zona merah tsunami. Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana dibutuhkan sebuah kapabilitas Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam mitigasi bencana melalui Sekolah Cerdas Bencana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Kapabilitas Pemerintah dalam Manajemen Bencana menurut Kusumasari, Alam dan Siddiqui yang memiliki 6 variabel, yang terdiri dari kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, implementasi kebijakan, sistem manajemen logistik, dan kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah belum kapabel dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. Pada kegiatan ini kelembagaan yang kurang jelas dan kualitas sumber daya yang belum memadai, Namun dari implemetasi kebijakannya sudah berjalan dengan baik yang didukung dengan ketersediaan finansial yang cukup. Meskipun manajemen sistem logistik belum maksimal dilakukan namun kepemimpinan sudah dilakukan dengan baik.

Kata Kunci: Kapabilitas, Kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, Pemerintah Kota Padang.

Abstract

The city of Padang is in a disaster-prone area, so an effort is needed to increase public awareness in dealing with disasters, commonly known as disaster mitigation. Increasing public awareness in facing this disaster starts in early childhood and is carried out in education. This effort was manifested in an activity called Disaster Intelligent School. This activity was carried out in schools located in the red tsunami zone. In carrying out the Disaster Smart School activities, a capability of the Padang City Government is needed. This study aims to describe and analyze the Padang City Government's capability in disaster mitigation through the Disaster Intelligent School. The theory used in this research is the Government Capability Model in Disaster Management, according to Kusumasari, Alam, and Siddiqui, which has six variables, consisting of institutions, human resources, finance, policy implementation, logistics management systems, and leadership. This research uses a descriptive qualitative approach. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data validity technique used was source triangulation. This research shows that the government is not yet capable of implementing Disaster Intelligent School activities. In this activity, the institutions were unclear, and the quality of the resources was

inadequate. However, from the policy's implementation, it was running well, supported by sufficient financial availability. Although the logistics system management has not been maximally implemented, the leadership has been carried out well.

Keywords: *Capability, Disaster Intelligent School Activities, Padang City Government*

PENDAHULUAN

Matera Barat yang berada di tepian Pulau Sumatera juga memiliki potensi bencana alam yang besar, termasuk Kota Padang. Dari segi geografis atau topologi, Kota Padang menjadi salah satu kota di Indonesia yang paling rawan bencana. Dilihat dari geologinya wilayah Kota Padang terdiri dari perpaduan bentuk lahan vulkanik di bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian tengah dan lahan marin bagian barat karena memiliki beberapa sungai yang memiliki aliran permanen sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang rawan bencana banjir. Tingginya tingkat bahaya banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi dan terjadinya pasang surut air laut. Tingkat bahaya banjir tinggi umumnya tersebar pada daerah yang memiliki satuan bentuk lahan daratan aluvial dan rawa¹.

Wilayah Kota Padang terletak di bagian pantai barat Pulau Sumatera yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia sehingga memiliki ombak cukup besar yang berpotensi terjadinya gelombang ekstrim dan abrasi. Secara tektonik wilayah Barat Indonesia merupakan wilayah yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh proses subduksi/interaksi 2 lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan adanya proses tersebut, daerah Kota Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempa bumi². Mitigasi bencana itu penting dilakukan agar seluruh masyarakat cerdas dan tidak panik disaat menghadapi terjadinya bencana. Di tahun 2018 dibuat sebuah program lain dalam mengupayakan mitigasi bencana dari aspek pendidikan di Kota Padang yang bernama Sekolah Cerdas Bencana yang merupakan

adaptasi dari program SMAB. Sekolah Cerdas Bencana (SCB) merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi³. Dari program ini diharapkan mencapai enam *output* penting⁴:

- Membentuk Kelompok Siaga Bencana Sekolah.
- Adanya identifikasi ancaman bencana.
- Penyusunan dokumen rencana evakuasi sekolah.
- Penyusunan SOP tanggap darurat sekolah.
- Melaksanakan latihan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan simulasi evakuasi mandiri.
- Adanya rencana tindak lanjut terkait penerapan Sekolah Cerdas Bencana secara berkesinambungan.

BPBD dalam menjalankan Sekolah Cerdas Bencana dibantu oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kebencanaan Kota Padang. LSM ini ikut langsung dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ke sekolah-sekolah. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Padang lain yang terkait dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ini adalah Dinas Pendidikan Kota Padang. BPBD Kota Padang dibagi menjadi tiga bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan logistik dan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi⁵.

³ Konsep Dasar Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)

⁴ Konsep Umum Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)

⁵ Data Kelembagaan BPBD Kota Padang tahun 2018.

¹ Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Padang hlm 5

² *Ibid.* hlm 6

Dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, bagian dari BPBD Kota Padang yang memiliki wewenang adalah seluruh Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Drs. Henry MM. Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat menentukan kapabilitas sebuah organisasi. Kekurangan Sumber Daya Manusia dapat menurunkan hasil kerja dari sebuah organisasi sehingga tidak mampu mencapai tujuan organisasi dengan maksimal.

Lembaga terkait yang berwenang dalam penanggulangan bencana ini adalah Pemerintah Kota Padang. Pada penelitian ini yang dimaksud Pemerintah Kota Padang adalah bagian eksekutif yakni Walikota Padang dan kemudian menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (yang selanjutnya disebut BPBD) sebagai lembaga yang berwenang atas penanggulangan bencana di Kota Padang.

Dalam kegiatan Sekolah Cerdas bencana, BPBD Kota Padang mendapatkan aliran dana dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 278.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah)⁶. Anggaran tersebut digunakan oleh BPBD Kota Padang dalam menjalankan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Besar anggaran tersebut diambil dari anggaran tahunan yang didapat BPBD Kota Padang dari APBD Kota Padang.

Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor penting dalam suatu kapabilitas organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi⁷. Pemimpin akan mempengaruhi bagaimana kapabilitas organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Dalam hal teknis, lembaga terkait BPBD Kota Padang membutuhkan sistem manajemen logistik dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk mampu berkomunikasi dengan berbagai *stakeholder*. Sistem manajemen logistik

merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada pasca bencana⁸.

Dalam Kapabilitas, implementasi kebijakan merupakan hal yang penting. Dengan tersedianya undang-undang, kebijakan, dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lain mampu menunjukkan bahwa organisasi memiliki kapabilitas. Peraturan yang ada juga berguna untuk memobilisasi sumber daya yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tidak melakukan kegiatan mitigasi bencana pada tingkat Sekolah Menengah Atas, karena merupakan kewenangan provinsi dan bukanlah ruang lingkup kota. Aksi ini tidak dilakukan langsung oleh Pihak BPBD Kota Padang, namun dibantu oleh organisasi-organisasi kebencanaan yang memiliki pengalaman dan tetap diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan. Hal ini juga diakibatkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di BPBD Kota Padang materi sosialisasi disusun bersama oleh BPBD Kota Padang dan organisasi tersebut.

BPBD memberikan materi kepada 47 sekolah (39 SD dan 8 SMP) yang ada di Kota Padang. Dari 47 sekolah yang termuat dalam tabel 1.3 tersebut telah mengalami perubahan atau pergantian satu sekolah. Ada satu sekolah yang menolak yakni SD Baiturrahmah 1-3 Padang untuk diberikan materi cerdas bencana atau dilaksanakannya program Sekolah Cerdas Bencana. Sekolah tersebut menolak dengan alasan dengan masuknya BPBD untuk melakukan program tersebut dapat mengganggu jam pelajaran yang telah tersusun di sekolah tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, Badan

⁶ Kerangka Acuan Kerja Sekolah Cerdas Bencana Tahun 2018 (Data dari BPBD Kota Padang)

⁷ Miftah, T. (2010). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁸ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tidak melakukan kegiatan mitigasi bencana pada tingkat Sekolah Menengah Atas, karena merupakan kewenangan provinsi dan bukanlah ruang lingkup kota. Aksi ini tidak dilakukan langsung oleh Pihak BPBD Kota Padang, namun dibantu oleh organisasi-organisasi kebencanaan yang memiliki pengalaman dan tetap diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan. Hal ini juga diakibatkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di BPBD Kota Padang materi sosialisasi disusun bersama oleh BPBD Kota Padang dan organisasi tersebut.

Peneliti memilih pada enam sekolah dasar dari setiap kecamatan dianggap menjadi perwakilan dari sekolah dasar-sekolah dasar yang berposisi paling rawan atau paling dekat dengan bibir pantai. Sekolah tersebut yakni SDN 27 Olo Padang, SDN 13 Sei. Beremas, SDN 09 Gauang, SDN 29 Ulak Karang, SDN 07 Pantai Air Manis dan SDN 06 Pasir Jambak Padang.

Dalam kondisi Kota Padang yang rawan bencana ini sesungguhnya pendidikan kebencanaan sangat dibutuhkan dan dilakukan secara lebih intensif. Dengan adanya aturan tersebut maka seharusnya pendidikan mengenai mitigasi bencana tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah kurikulum sebagai mata pelajaran muatan lokal. Dengan melihat fenomena-fenomena diatas, peneliti ingin melihat dan meneliti tentang “Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana”.

Merujuk pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara dengan informan yang terpilih menggunakan teknik *purposive dan snowball sampling*. Dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan

kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam mitigasi bencana melalui Sekolah Cerdas Bencana. Teori yang digunakan adalah teori Kapabilitas menurut Kusumasari, Alam, dan Siddiqui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitigasi bencana merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi seluruh masyarakat. Terlebih lagi dengan kondisi geografis Kota Padang yang berada pada daerah yang rawan bencana. Mitigasi merupakan serangkaian upaya pencegahan dan pengurangan kemungkinan risiko, pengurangan konsekuensi risiko, menghindari risiko, penerimaan risiko, serta transfer, pembagian, atau penyebarluasan risiko. Untuk itu dibutuhkan kapabilitas (kemampuan) dari Pemerintah Kota Padang agar mampu menyelenggarakan mitigasi bencana di Kota Padang dengan baik. OPD terkait yang bertanggung jawab dalam hal mitigasi bencana di Kota Padang adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

1. Kelembagaan

Dibutuhkan sebuah struktur organisasi bagi setiap organisasi agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertata. Dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ini hanya menggunakan petunjuk pembagian kerja melalui sebuah Keputusan Kepala Pelaksana. Petunjuk pelaksanaan kerja tersebut termuat di Keputusan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Nomor 116 tentang Tenaga Ahli dan Fasilitator Kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. Peraturan ini tidak dapat menggambarkan struktur organisasi dengan jelas karena hubungan antar komponen bagian dalam organisasi, sehingga kejelasan susunan antar bagian juga belum dapat tergambar jelas.

Tidak adanya struktur pelaksana yang jelas akan mengakibatkan ketidakjelasan peran, tugas, dan pola kerja dari tim pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. Tim pelaksana tersebut menjadi bergerak dan melakukan sesuatu tanpa arah yang jelas dan batasan yang

jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana menjadi tidak teratur dan menghasilkan kegiatan yang tidak maksimal.

Pengaturan peran juga sangat dibutuhkan agar setiap pelaksana mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai porsinya. Peran dari masing-masing orang dalam tim pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana kurang jelas. Setiap orang membutuhkan kejelasan perannya dalam setiap pekerjaannya dan akan berpengaruh pada kapabilitas sebuah organisasi. Tidak jelasnya peran dari tim tersebut terjadi karena tidak adanya dokumentasi secara tertulis terkait rincian dari peran untuk masing-masing kedudukan dalam tim tersebut. Tidak ada keterangan lanjutan mengenai tugas pokok dan fungsi yang mampu menjelaskan secara rinci terkait pekerjaan masing-masing.

Pekerjaan atau tugas yang dimaksud disini adalah perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sebagai tanggung jawab dalam suatu jabatan/bidang dalam sebuah organisasi. Tugas tenaga ahli dan fasilitator kegiatan Sekolah Cerdas Bencana kurang jelas karena tidak adanya pemaparan secara tertulis tentang rincian tugas dari setiap posisi dalam tim pelaksana tersebut. Ini mengakibatkan kurang teratur dan kurang jelasnya batasan tugas dari setiap posisi pada kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ini. Porsi pekerjaan atau tugas dari masing-masing posisi dalam tim juga tidak terbagi dengan jelas. Namun disini lain yakni cara penyampaian materi kegiatan, tim fasilitator ini melaksanakan tugas penyampaian materi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari murid-murid yang membahas kembali materi yang diterima saat kegiatan di sekolah bersama orang tuanya di rumah.

Tanggung jawab berarti berani menanggung apapun hasil dari perbuatan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab dari tim pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana masih kurang. Bentuk pengecekan ulang melalui kunjungan ke sekolah setelah pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ini menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban tim

pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana terhadap penyelesaian tugas yang telah dilakukannya di sekolah-sekolah. Tidak adanya pengecekan ulang tersebut mengartikan kurangnya bentuk tanggung jawab dari BPBD Kota Padang terhadap kegiatan Sekolah Cerdas Bencana yang telah dilaksanakannya, karena dengan tidak adanya kunjungan tersebut, pihak sekolah yang mencoba kegiatan mitigasi di sekolah secara mandiri secara rutin tidak mengetahui secara pasti bahwa yang telah mereka lakukan itu benar atau tidak.

Dalam melakukan kegiatan ini BPBD Kota Padang tidak melakukan *networking* dengan tingkat Nasional seperti Pemerintah Pusat dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), tingkat provinsi seperti Pemerintah Provinsi dan BPBD Provinsi, tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan, dan tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga).

Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam melakukan mitigasi bencana melalui Sekolah Cerdas Bencana jika dilihat dari kelembagaannya dapat dilihat dari kelembagaannya dapat dikatakan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya struktur organisasi tim pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, dan juga tidak adanya uraian atau pemaparan dari peran, tugas, dan tanggung jawab untuk setiap posisi dari tim pelaksana Sekolah Cerdas Bencana. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing tim pelaksana kegiatan tersebut, serta *networking* yang tidak berjalan ke seluruh level pemerintahan seperti tingkat nasional, kecamatan, dan kelurahan.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam teori Bevaola Kusumasari, Siddiqui, dan Alam dalam sebuah Pemerintah Daerah harus Sumber Daya Manusia yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang

jas⁹. Sumber Daya Manusia adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional (*the people who ready, willing and able to contribute to organizational goals*). Sumber Daya Manusia juga merupakan pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Dalam penanggulangan bencana di Kota Padang merupakan tanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Oleh karena itu dibutuhkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk bisa menjalankan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Padang. Sumber Daya Manusia yang ada di BPBD Kota Padang ada sebanyak 42 orang.

Untuk ketersediaan jumlah sumber daya manusia tidak menjadi suatu kendala. Ke 77 sumber daya manusia yang ada sanggup melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana dengan baik. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana dari sisi sumber daya manusia. Kendala yang terjadi adalah sumber daya manusia yang ada di BPBD Kota Padang dilihat dari kualitas sumber daya manusia nya terutama untuk tenaga fasilitator.

Organisasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada kerjasama dan pembagian pekerjaan yang jelas. Delegasi dan pembagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh tingkat manajer dalam setiap organisasi. Pendelegasian adalah pengalihan sebagian wewenang formal manajer kepada bawahannya. Delegasi biasanya dibagi dalam beberapa aspek, yaitu pengalokasian tugas, pelimpahan wewenang dan pemberian tanggung jawab kepada bawahan dan menerima pertanggungjawaban. Delegasi pekerjaan juga diartikan sebagai pembagian pekerjaan.

Sebuah kapabilitas sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk melaksanakan setiap kegiatan.

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang akan menggerakkan setiap organisasi demi mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Fenomena dalam penelitian yang ditemukan peneliti adalah sumber daya manusia sudah mencukupi namun dari sisi kualitas masih kurang terutama tenaga fasilitator di BPBD Kota Padang. Pembagian pekerjaan bagi sumber daya manusia juga kurang jelas karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai pembagian pekerjaan dari setiap orang dalam tim pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. Dari fenomena tersebut juga akan menghambatnya kapabilitas dari setiap organisasi.

3. Implementasi Kebijakan

Dalam teori Kapabilitas Pemerintah Daerah menurut Kusumasari, Siddiqui, dan Alam, dalam kapabilitas juga harus ada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang dimaksud adalah dengan tersedianya undang-undang, kebijakan, dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya.

Kebijakan, undang-undang, aturan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Aturan terkhusus yang mengatur tata cara pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana belum ada. Ketersediaan Undang-undang, kebijakan dan peraturan menjadi hal penting dalam kapabilitas sebuah organisasi. Sebuah aturan digunakan sebagai landasan setiap organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan undang-undang, kebijakan, dan peraturan dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana telah tersedia namun peraturan tersebut belum tepat karena peraturan tersebut merupakan peraturan terdahulu dan tentunya peraturan tersebut tidak dapat menjadi acuan dan

⁹ Bevaola, K. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

pedoman sepenuhnya untuk kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ini.

Hubungan ini dijalin oleh dua atau lebih organisasi yang saling membutuhkan. Organisasi ini menjalin hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk pelaksanaan Sekolah Cerdas Bencana dibentuk sebuah tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana telah menjalin hubungan dengan institusi lain, namun hubungan yang dijalin dengan Dinas Pendidikan Kota Padang ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini juga menjadi perhatian peneliti, diketahui bahwa kegiatan Sekolah Cerdas Bencana berlokasi di sekolah-sekolah yang dasarnya merupakan gawean Dinas Pendidikan Kota Padang. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan ini, BPBD Kota Padang datang dan masuk ke sekolah-sekolah untuk pemberian materi sosialisasi terkait Sekolah Cerdas Bencana. Disini hubungan dengan institusi lain telah dijalin namun hubungan yang dijalin belum baik.

4. Keuangan

Keuangan merupakan hal penting dalam sebuah organisasi dan perusahaan. Keuangan menjadi sumber daya dalam melaksanakan suatu kegiatan demi jalan dan hidupnya sebuah organisasi. Bahkan bagi sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, keuangan menjadi sumber daya utama dalam jalannya perusahaan dan menjadi tujuan perusahaan tersebut.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana adalah sebesar 276.855.250 rupiah. Pengelolaan anggaran atau keuangan dari pihak BPBD Kota Padang atau tepatnya bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang belum begitu terkoordinir dengan baik. Penggunaan anggaran tersebut dilakukan dengan kurang efektif sehingga anggaran yang berlebih tersebut masih saja dianggap kurang. Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan keuangan terkait pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana telah mencukupi namun peneliti berasumsi bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan kurang baik,

sehingga penggunaan anggaran juga berjalan dengan kurang efektif. Pengelolaan keuangan ini juga menjadi salah satu menghambat dan berkurangnya kapabilitas dari sebuah organisasi dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasinya.

5. Teknis

Teknis yang dimaksudkan dalam teori yang disampaikan oleh Kusumasari, Alam dan Siddiqui adalah memiliki sistem logistik manajemen dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk dapat berkomunikasi dan menjalin network dengan berbagai stakeholder. Sistem logistik manajemen, sistem teknologi informasi yang efektif, dan menjalin networking dengan berbagai stakeholder adalah hal teknis yang sangat penting bagi kapabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen bencana.

Hal-hal terkait sistem manajemen logistik di Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Sistem adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menjalankan suatu kegiatan. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengelola suatu kegiatan yang biasanya dalam kegiatan tersebut digunakan pendekatan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana¹⁰.

Sistem manajemen logistik kurang terlaksana dengan baik, tim pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana hanya melakukannya melalui materi sosialisais

¹⁰ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

kegiatan. Sistem manajemen logistik yang seharusnya dilihat dari kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana baik secara nasional, regional, lokal maupun ataupun setempat. Pelaksanaan yang terjadi di kegiatan Sekolah Cerdas Bencana hanyalah diaplikasikan dalam sebuah materi. Tim pelaksana tidak melakukan pembangunan infrastruktur, tidak menyediakan alat transportasi dan tidak memberikan logistik kepada murid-murid ataupun guru di sekolah-sekolah tempat mereka melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana tersebut.

Sistem teknologi informasi merupakan sistem yang akan berguna untuk mendukung dan meningkat kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. teknologi informasi dalam guna publikasi informasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan BPBD Kota Padang sendiri. Namun publikasi yang dilakukan ini kurang begitu efisien karena kiriman ini tidak menjelaskan bentuk dan kegunaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. Publikasi informasi yang baik harusnya publikasi yang bisa menginformasikan tentang pengenalan, bentuk dan kegunaan serta pentingnya mitigasi bencana dari dini melalui kegiatan Sekolah Cerdas Bencana.

Sistem manajemen logistik serta teknologi informasi untuk penyebaran informasi telah dilakukan oleh BPBD Kota Padang. Namun dalam pelaksanaannya dirasakan kurang maksimal dilihat dari sistem manajemen logistik yang hanya dilakukan melalui materi sosialisasi kegiatan Sekolah Cerdas Bencana dan kiriman *facebook* yang dilakukan juga belum menjelaskan maksud yang jelas terkait kegiatan Sekolah Cerdas Bencana itu sendiri.

6. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. pemimpin yang dilakukan baik dari Walikota Padang,

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, dan Koordinastor Utama Tenaga Ahli dan Fasilitator Kegiatan Sekolah Cerdas Bencana telah dilakukan dengan baik. Dalam menilai kapabilitas, kepemimpinan merupakan hal penting yang menunjang kapabilitas itu sendiri. Kepemimpinan seorang pemimpin akan mempengaruhi segala hal dalam hal organisasi baik dari daya kerja sumber daya manusia, pengaturan kelembagaan itu sendiri, dan pengaturan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam mitigasi bencana melalui kegiatan Sekolah Cerdas Bencana belum memadai. Hal ini dikarenakan tim pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana belum memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. Kelembagaan untuk tim pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana juga belum jelas sehingga setiap orang belum mengetahui peran, tugas, dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana dengan jelas. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap suatu kapabilitas Pemerintah Kota Padang sehingga mampu melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas bencana lebih maksimal. Faktor lain yang menyebabkan belum memadainya kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam mitigasi bencana melalui Sekolah Cerdas Bencana dilihat dari sisi logistik yang belum diaplikasikan dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, K., & Said. (2017). *Manajemen dan Teori Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hendropuspito. (1989). *Sosiologi Sistemik*. Jakarta: Kanisius.
- John W. C. (2013). *Research Design Edisi 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

- Mapata. (2017). *Buku Penunjang Ilmu Pengetahuan Sosial Pengembangan Silabus Kurikulum 2013 versi 2016 Peserta Didik Kelas VII Satuan Pendidikan SMP, MTS, Dan Atau Sederajat*. Yogyakarta : DEEPUBLISH.
- Matthew B. M., & Michael A. H., (1994). *Qualitative Data Analysis Second Edition*. United States of America: Sage Publications.
- Ndraha, T. (1999). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Norman K. D., & Yvonna S. L. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurjanah, etc. (2012). *Manajemen Bencana*. Jakarta: ALFABETA.
- Riyai, V. (2002) *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosady, R. (1998). *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. (2003). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lawrence, W. N. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seven Edition*, Pearson Education Limited, United States of America.
- Yeremias T. K. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Alhadi, Z. (2011). *Upaya Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Dan Tsunami*. Tidak Dipublikasikan.
- Astuti, S. I., & Sudaryono. (2010). Peran Sekolah Dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. Volume 1 NO.1/2010: 30-42).
- Pratomo, Rahmat., & Radiarto. (2013). Permodelan Tsunami dan Implikasinya Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Palu. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, (Volume 9(2). 174-182).
- Putera, R. E., & Nurasa. (2017). Menuju Indonesia Tangguh Bencana : Belajar dari Pengalaman Kota Padang dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Kebencanaan di Sekolah. *Jurnal Administrasi dan Organisasi*. (Volume 23; 1-12). Disampaikan dalam Konferensi Nasional Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung.
- Shaluf, I. M. (2007). “Disaster Types”, Disaster Prevention and Management. *An International Journal*. (Vol 16 Issue: 5,pp.704-717).
- Tarigan, P. S. P. (2013). *Pelaksanaan Program Pengurangan Risiko Bencana Terpadu Berbasis masyarakat : Studi Kasus Program Pertama OD/CB Palang Merah Indonesia Di Kabupaten Tanah Merah Indonesia Di Kabupaten Tanah Datar – Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013*. Tidak Dipublikasikan.
- Dokumen Pemerintah**
- Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil BPBD. (2018) Kota Padang.
- Data Kelembagaan BPBD. (2018). Kota Padang.
- Dokumen Grand Design Padang Kota Cerdas Bencana.
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
- Kerangka Acuan Kerja Sekolah Cerdas Bencana Tahun 2018
- Konsep Dasar Sekolah Cerdas Bencana
- Konsep Umum Sekolah Cerdas Bencana.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Padang.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi BPBDPK.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah Madrasah Aman dari Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli dan Fasilitator Kegiatan Sekolah Cerdas Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Walikota Padang Nomor 70 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019.

Standar Operasional Prosedur Logistik (Data dari BPBD Kota Padang)

Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Website :

<https://bnpb.go.id> diakses tanggal 11 juli 2018.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-sekolah-cerdas-bencana> diakses tanggal 28 Juni 2018.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-sekolah-cerdas-bencana> diakses tanggal 10 Juni 2018.